

PEMKOT YOGYA SERAHKAN LKPD 2024 KE BPK

Disampaikan Awal Waktu, Siap Pertahankan Opini WTP

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya kembali mampu menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY pada awal waktu. Penyampaian yang jauh sebelum batas terakhir tersebut sekaligus menunjukkan kesiapan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

LKPD unaudited tahun anggaran 2024 Pemkot Yogya diserahkan oleh Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sugeng Purwanto kepada Kepala Perwakilan BPK DIY Agustin Sugihartatik. Momen itu bersamaan dengan penyerahan LKPD unaudited Pemda DIY, Kabupaten Sleman, Gunungkidul, dan Bantul. Batas akhir penyampaian LKPD oleh masing-masing pemda ialah akhir Maret. "Yang pasti ini merupakan satu kewajiban dari Pemkot Yogya untuk menyerahkan LKPD. Sudah menjadi kewajiban rutin setiap tahun," jelas Sugeng di sela penyampaian LKPD 2024, Senin (17/2).

Dirinya menegaskan penyerahan LKPD sebelum batas waktu itu bagian dari komitmen dan ketegasan Pemkot Yogya. Menurutnya hal itu tidak lepas dari peran serta aktif para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Yogya. Sugeng menyatakan setelah LKPD diserahkan, akan di-

lakukan pemeriksaan oleh BPK. Untuk itu Pemkot Yogya siap menjalani pemeriksaan terperinci terhadap LKPD 2024. "Kami selalu berharap WTP kami sudah baik selama ini. Harapan kami nanti untuk pelaksanaan kinerja 2024 betul-betul tidak ada permasalahan yang berarti sehingga WTP juga masih bisa kami peroleh," tuturnya.

Selain itu pihaknya juga telah mengikuti entry meeting pemeriksaan interim atau pendahuluan atas LKPD tahun 2024 yang dilakukan BPK RI Perwakilan DIY pada awal Februari 2025. Sejauh ini LKPD Pemkot Yogya telah meraih predikat opini WTP ke-15 kali secara berturut-turut. Hal itu menunjukkan kepatuhan dan kewajaran penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas dan transparansi Pemkot Yogya dalam pertanggungjawaban pengelolaan APBD. "Insya Allah tidak ada permasalahan yang berarti sehing-

ga ke depan Pemkot Yogya khususnya bisa melakukan kinerja yang lebih baik di bawah walikota dan wakil walikota definitif," tambah Sugeng.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPK DIY Agustin Sugihartatik, mengatakan sesuai aturan tentang pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah, LKPD yang telah direview Inspektorat disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pihaknya mengapresiasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota di wilayah DIY yang menyampaikan LKPD sebelum jangka waktu itu. "Pemeriksaan atas LKPD ini merupakan pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK dengan tujuan memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan," terangnya.

Selain memuat opini, pemeriksaan atas LKPD juga akan menghasilkan temuan yang signifikan dan material. Terhadap temuan itu BPK akan memberikan rekomendasi yang merupakan saran atau masukan untuk perbaikan dan peningkatan sistem atau proses dalam organisasi atas permasalahan-permasalahan yang timbul. Adapun laporan hasil pemeriksaan LKPD disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima LKPD.

Sedangkan Wakil Gubernur DIY Paku Alam X mewakili kepala daerah yang hadir menyampaikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan publik. Diharapkan laporan keuangan ini juga menjadi daya dorong dalam upaya mengantarkan DIY meraih WTP.

"Ke depan seiring tantangan yang semakin kompleks kita perlu memperkuat kolaborasi agar tata kelola keuangan daerah semakin berkualitas. Mari terus melangkah maju membangun pemerintah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat," pesannya. **(Dhi)-d**

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Pilar Utama Membangun Kepercayaan Publik



Paku Alam X dan Kepala Perwakilan BPK DIY Agustin Sugihartatik dalam acara penyampaian LKPD Tahun Anggaran 2024.

YOGYA (KR) - Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam X secara resmi menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan tersebut sekaligus representasi dari komitmen Pemda DIY dalam menjaga integritas, kredibilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

"Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan publik. Kepercayaan ini adalah modal sosial yang menopang tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," kata Sri Paku Alam X dalam acara penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024 di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan DIY, Senin (17/2).

Wagub DIY berharap adanya laporan keuangan tersebut bisa menjadi daya dorong dalam upaya mengantarkan DIY meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-15 kalinya ke depan, seiring dengan tantangan yang semakin kompleks. Untuk itu Pemda perlu memperkuat kolaborasi, agar tata kelola keuangan sejumlah daerah di DIY semakin berkualitas.

"Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Sementara Kepala Perwakilan BPK DIY Agustin Sugihartatik menyampaikan apresiasi kepada Gubernur DIY, bupati dan walikota yang telah menyampaikan laporan keuangan kepada BPK lebih cepat dari waktu semestinya. Yaitu paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk itu pihaknya mengapresiasi Pemda DIY serta kabupaten dan kota di Wilayah DIY yang menyampaikan laporan keuangan sebelum batas waktu yang sudah ditentukan. Karena sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (2) mengatur bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

"Dua bulan sejak hari ini, kami akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang telah kami audit. Mudah-mudahan semua prosesnya lancar, sehingga nantinya BPK dapat menyampaikan LHP tepat waktu," terangnya. **(Ria)-d**



Pj Walikota Yogya Sugeng Purwanto menyampaikan dokumen LKPD tahun anggaran 2024 ke BPK RI Perwakilan DIY.

PELAKSANAAN DI SMKN 4 YOGYA LANCAR

Agar Tak Membosankan, Menu Agar Variatif

YOGYA (KR) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pelajar di Kota Yogyakarta secara resmi dimulai pada Senin (17/2) yang dilaksanakan di SMKN 4 Yogyakarta. Adapun waktu makan ditetapkan pukul 09.00 WIB, menyesuaikan dengan kondisi siswa yang belum sempat sarapan di rumah. Untuk wilayah Yogyakarta program MBG untuk para pelajar akan dilaksanakan secara bertahap di beberapa sekolah.

"Kalau untuk tahap awal kami mulai di SMKN 4 Yogyakarta. Setelah itu akan dievaluasi dan dikembangkan ke sekolah lain. Evaluasi itu bukan hanya dari pihak penyelenggara, tetapi juga melibatkan masukan dari siswa terkait variasi menu. Semua itu dilakukan untuk memastikan program berjalan lancar. Adapun lokasi sekolah yang dipilih untuk implementasi tahap awal adalah yang dekat dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar distribusi makanan tetap segar," kata Kepala Disdikpora DIY, Suhirman di sekolah setempat, Senin (17/2).

Setelah dilaksanakan di SMKN 4 Yogya, program itu rencananya akan diperluas ke sekolah lain yang dekat dengan SPPG, seperti SMKN 5 Yogya. Selain itu waktu dekat, jumlah penerima manfaat di SMKN 4 juga akan bertambah menjadi 1.200 siswa.

Salah satu siswa penerima MBG dari kelas 10 Kuliner 2 Reta mengaku, senang mendapatkan makan bergizi gratis. Karena program MBG selama ini memang sudah digantikan oleh siswa di sekolahnya. "Kalau untuk menu yang disajikan cukup enak dan bergizi. Ada buncis, tahu bacem, ayam goreng, dan pisang. Saya berharap menu yang diterima ke depan bisa lebih bervariasi, seperti adanya

penambahan susu atau menu khas seperti rendang," ungkap Reta.

Sementara itu Kepala SMKN 4 Yogya Nurlatifah Hidayati mengungkapkan, untuk pelaksanaan MBG hari pertama di sekolahnya berjalan cukup lancar. Begitu sampai di sekolah, sebanyak 640 paket makan telah dibagikan kepada siswa kelas 10.

"Kalau untuk pelaksanaan hari pertama lancar, semua sudah lengkap. Ada lauk, buah, sayur, dan nasi. Anak-anak kami juga senang karena selain enak, porsinya pas dan tidak kurang," ungkapnya.

Nurlatifah menyatakan, meski secara umum pelaksanaan MBG lancar, pihak sekolah tetap membuka ruang untuk evaluasi. Beberapa siswa mengusulkan agar menu lebih bervariasi agar tidak mem-

bosankan. Dengan adanya program MBG, siswa diharapkan tidak perlu lagi membawa bekal atau membeli makanan di kantin untuk sarapan. Walaupun begitu, kantin sekolah tetap buka untuk menyediakan jajanan ringan.

"Kalau untuk sarapannya pagi, sementara anak-anak belajar sampai sore. Biasanya mereka jajan dua kali, jadi kantin tetap bisa beroperasi dengan menu berbeda. Dalam program MBG SMKN 4 menerapkan aturan khusus terkait penggunaan nampun makan. Siswa wajib mengembalikan nampun setelah makan agar tetap tertib dan disiplin," jelas Nurlatifah, seraya menambahkan, aturan itu bukan dari badan gizi, tapi pihak sekolah yang mengkon-disikan agar anak-anak belajar disiplin dan menjaga kebersihan. **(Ria)-d**



Siswa SMKN 4 Yogya saat menikmati menu MBG di sekolahnya.

PENGUMUMAN
Nomor : 4/Peng-33.04.HP.01/11/2025

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian Hak baru atas Tanah Asal konversi Hak Barat, dan untuk mendapatkan Sertifikat Baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan untuk kegiatan permohonan hak atas tanah, dengan ini diumumkan sebagai berikut :

No	Nomor Hak	Atas Nama	Letak Tanah	Luas Tanah	Hak berakhir Tanggal	Dijadikan permohonan Hak Oleh
1	Tanah Negara bekas Hak Pakai Nomor 75	Suprpto	Desa Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara	411 m ²	23-09-1980	Persyarikatan Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta
2	Tanah Negara bekas Hak Eigendom	-	Desa Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara	644 m ²	-	Persyarikatan Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta

Barang siapa merasa keberatan atas permohonan tanah tersebut diberi kesempatan selama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengumuman ini untuk mengajukan keberatan secara tertulis dengan disertai bukti-bukti yang sah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, Jalan Letjen Suprpto No. 68 Banjarnegara.

Banjarnegara, 17 Februari 2025
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara
di Bandung
NURDIN KAREPESINA, S.SIT
NIP. 196706161991031004

Kedaulatan Rakyat
EPAPER
www.kr.co.id

Berlangganan Scan Barcode

Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggaman tangan Anda. Sekarang.